

TESIS

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API
DI PERAIRAN INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

**SUNARSO
NPM : 15310006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017**

TESIS

KEWENANGAN TNI AL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DI PERAIRAN INDONESIA

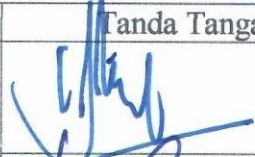
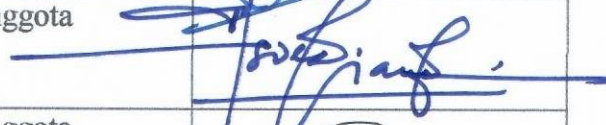


Dipersiapkan dan disusun oleh :

SUNARSO SH

N P M : 15310006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 4 Agustus 2017

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
1. Dr. Titik Suharti, SH, M.Hum	Ketua	
2. Dr. Suhandi, SH, M.Hum	Anggota	
3. Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum	Anggota	
4. Noor Tri Hastuti, SH, M.Hum	Anggota	

**Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal - Agustus 2017**

Ketua Progrm Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

TESIS

KEWENANGAN TNI AL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DI PERAIRAN INDONESIA

Diajukan oleh :

SUNARSO SH

N P M : 15310006

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 28 Juli 2017

Oleh

Pembimbing I



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

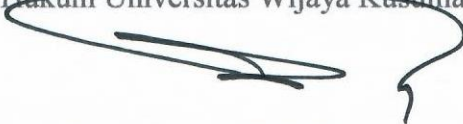
Pembimbing II



Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Progm Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Peneliti menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

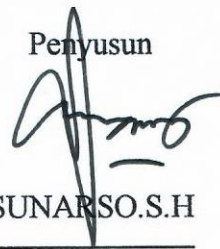
1. Bapak Prof.H.Sri Harmadji,dr.Sp.THT.KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Bapak Bambang Yunarko,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr.Ari Purwadi,SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr.Umi Enggarsasi,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Noor Tri Hastuti,SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan penuh kesabaran.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Surabaya, atas izin dan kemudahannya yang penyusun peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Istriku tersayang Indah Suliati dan anak-anakku tercinta Angga Viesto Alvindo dan Carina Dwi Chintya Lavinda yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan memberikan dorongan moril.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Agustus 2017

Penyusun



SUNARSO.S.H

NPM . 15310006

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sunarso S.H
NPM : 15310006
Alamat : Perumahan Mutiara Citra Graha Blok E2 no.9 Bligo
Sidoarjo
No. Telp (HP) : 08127072127

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : “ **KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DI PERAIRAN INDONESIA** “ adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya , Agustus 2017

Yang menyatakan,



SUNARSO, S.H

N P M : 15310006

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1-9
B. Tujuan Penelitian	9-10
C. Manfaat Penelitianl	10-11
D. Kajian Teoritis	11-23
E. Metode Penelitian.....	23-24
F. Sistematika Pertanggungjawaban	24-25
BAB II KEWENANGAN TNI AL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN SENJATA API DI PERAIRAN INDONESIA	
1. Dasar Hukum Kewenangan TNI Angkatan Laut sesuai hukum Nasional dan hukum Internasional.....	26-46
2. Kewenangan TNI Angkatan Laut berkaitan dengan kejahatan penyeludupan senjata api di Perairan Indonesia.....	46-54

BAB III OPTIMALISASI KEWENANGAN TNI AL DALAM
PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYELUDUPAN SENJATA API DI PERAIRAN INDONESIA

1. Tugas dan Peran TNI Angkatan Laut 54-60
2. Optimalisasi penegakan hukum oleh TNI AL guna mencegah
kejahatan tindak pidana penyeludupan senjata api di Perairan
Indonesia..... 61-70

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 71-72
2. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagec state*) terbesar di dunia yang posisinya sangat strategis. Luas launya 2/3 dari wilayah daratannya, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang paling terbesar di dunia dan memiliki sumber daya laut yang berlimpah. Sumber daya laut yang melimpah belum dapat terjaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga berdampak meningkatnya tindak pelanggaran atau pun kejahatan melalui laut di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing berupa illegal fishing, illegal mining, human trafficking, penyeludupan baik narkoba maupun senjata api. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9 disebutkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya ditulis TNI AL) sebagai komponen pertahanan negara salah satu tugasnya menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga dengan demikian seharusnya setiap kejadian tindak pidana di laut, TNI AL memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan sampai proses lanjut ke pengadilan termasuk juga permasalahan tindak pidana penyeludupan senjata api. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perbedaan persepsi tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api (Lembaran Negara RI Nomor 78 Tahun 1951) pasal 6 ayat (1) yang tidak secara spesifik menyebutkan siapa penyidik, sehingga persepsinya bahwa penyidik hanya Kepolisian sesuai KUHAP pasal 6 ayat (1) huruf b, padahal ada penyidik tindak pidana tertentu lainnya sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah undang-undang yang terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang sedang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TNI AL memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyeludupan senjata api di perairan Indonesia sehingga perlu adanya perubahan regulasi tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api oleh Pemerintah guna mengoptimalkan kewenangan TNI AL dalam hal penyidikan di laut guna menjaga kedaulatan dan menegakan hukum di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Kata kunci : kewenangan TNI AL, penyidikan, perairan Indonesia

Abstract

Indonesia is archipelago state in the world's largest island country that has a strategic location astride major sea lanes. The fact that Indonesia's seas constitute 2/3 of its land surface, makes Indonesia one of the country in the world with biggest sea areas and abundant sea resources. These abundant sea resources has not been used optimally, especially for Indonesian people's welfare, and therefore it impacted on increasing the criminal acts by foreign flagged ships such as illegal fishing, illegal mining, human trafficking, and smuggling operations for both narcotics or firearms. According to act 34/2004 about the Indonesian National Armed Forces (abbreviated as TNI), Article 9, one of the task of Indonesian Navy as part of TNI and as the country's core defense component is to enforce the law and maintain the security in Indonesia's maritime jurisdiction in accordance with the provisions of the national laws and ratified international laws. Therefore, for any criminal acts in the sea, Indonesian Navy should have the authority to carry out investigations until proceeding to the court. This, including the issue of criminal acts of firearms smuggling. But this cannot be done due to different perceptions of Emergency law 12/1951 about fire arms (State Gazette of The Republic of Indonesia Year 1951 Number 78) article 6 verse (1) which does not specifically state who the investigator is, and that turns the perception that the investigator is only the Police according KUHAP Article 6 verse (1) letter b, for whereas there are other criminal acts investigators according to RI Government Rules 27/1983 about KUHAP implementation.

The research method that is used are statute approach, by reviewing the relevant laws and regulation related to the legal issues being discussed.

The results of this research indicate that Indonesian Navy has the authority to carry out an investigation of the criminal acts of firearms trafficking and smuggling operations in Indonesia's maritime areas. So there is a need for regulatory changes regarding Emergency Law 12/1951 about firearms by the government to optimize the authority of Indonesian Navy in terms of investigation at the sea in order to maintain sovereignty and law enforcement in the sea of Indonesia's national jurisdiction.

Keywords: The Authority of Navy, Investigations, Sea waters of Indonesia